

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Fuad Usfa. 2004. Pengantar Hukum Pidana, Malang: UMM Press.
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta.
- Achmad Ali.2015. Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Jakarta:Kencana.
- Adami Chazaw. 2002. "Pelajaran Hukum Pidana". Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika.
- Allan Manson, 2001, The Law of Sentencing, Irwin Law.
- Andi Hamzah, 1968, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi hamzah, 2002. Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana universitas Trisakti.
- Andi Hamzah, 2008. Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, ed. 3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief , 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.
- Darwan Prinst, 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Citra Aditya.
- Erdianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
- Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007. Pengertian Tindak Pidana Korupsi, ed. kedua, (Jakarta: Sinar Grafika.
- HB. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Henry Campbell Black, 1968, Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition), Minnesota: West Publishing,
- Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2018 Edisi Pertama, Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Mirra Buana Media : Yogyakarta.
- Jazim Hamidi dan Winahyu Erwiningsih, 2000, Yurisprudensi tentang Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang layak, PT. Tata Nusa, Jakarta.
- Leden Marpaung.2012 Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
- Litbang Mahkamah Agung, 2010, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI. 2017. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI: Jakarta.

- Mahkamah Agung, 2005. Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Martin Basiang, 2009, The Contemporary Law Dictionary (First Edition), Red & White Publisihing.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Toeri-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- Muladi, 1985, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, Bandung: Alumni.
- Ninie Suparni. 2007. “ Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”. Sinar Grafika, Jakarta.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2010. Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI.
- Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya.
- Satjipto Raharjo, 1982. Ilmu Hukum. Bandung:Alumni.
- Sudarto, 1977. Hukum Pidana 1, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 2004. Mengenal Hukum Satau Pengantar, Liberty, Cetakan Ke dua, Yogyakarta.
- Syarifuddin. 2021. Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: KENCANA.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Website

- Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>. diakses 9 September 2022.
- <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/pengertian-terlapor-tersangka-terdakwa-dan-terpidana/>. diakses 30 Juli 2024
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8d4561371509e94303931353236.html>. diakses 21 Juli 2024
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-tersangka-terdakwa-dan-terpidana-cl4236/>. diakses 30 Juli 2024

Wawancara

- Wawancara, Hakim Sutisno Pengadilan Negeri Makassar, Kantor Pengadilan Negeri Makassar, Hari Jumat, Tanggal 17 Maret 2023.

Wawancara, Hakim Abd. Rahman Karim, Pengadilan Negeri Makassar, Kantor Pengadilan Negeri Makassar, Hari Jumat, Tanggal 17 Maret 2023.

Wawancara YM. Hakim Andi Nurmawati, Di Kantor Pengadilan Negeri Makasaar, Hari Jumat, Tanggal 17 Maret 2023.

Wawancara YM. Hakim M. Kaisar Fatwa Agung, Di Kantor Pengadilan Negeri Makasaar, Hari Jumat, Tanggal 17 Maret 2023.